

# WARTA ILO Jakarta

**MERAIH  
MASA DEPAN**  
tanpa Pekerja Anak

**Membangun  
Kembali Yogyakarta  
dan Jawa Tengah**

**Mengelola Kembali  
Usaha setelah  
Tsunami**

**Dua Seniman Musik  
Jadi Duta Buruh Migran  
Indonesia**

**Orang Hidup dengan  
HIV/AIDS Dilatih  
Memulai Usaha Sendiri**



**ARTIKEL**-artikel dalam Warta ILO Jakarta kali ini terfokus mengenai hal-hal yang terkait *Program Pekerjaan Layak ILO di Tingkat Negara*. Program ini ditujukan untuk mendukung pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja melangkah maju menjalankan tujuan-tujuan pekerjaan layak, yang dikembangkan berdasarkan masukan yang mereka sarankan.

Di Indonesia, prioritas kegiatan adalah: **(1) menghapuskan eksploitasi di tempat kerja, terutama bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dan tindak kekerasan yang dialami banyak pekerja migran; (2) mempromosikan penciptaan lapangan kerja sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan membantu pemulihan mata pencaharian, terutama di daerah yang terkena krisis atau tertinggal; dan (3) memperkuat administrasi ketenagakerjaan dan dialog sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang baik serta pelaksanaan hak-hak kerja.**

Banyak dari program-program ini terfokus pada kaum muda Indonesia – membantu mereka memperoleh masa depan yang lebih baik (begitu pula dengan masa depan negara) melalui kesempatan pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Artikel-artikel di Warta ini pun membahas mengenai kemajuan yang dicapai di bidang-bidang tersebut – dan upaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan nyata.

Di Timor Leste, prioritas dari Program Kerja Layak adalah mendukung proses pembangunan nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan memperkuat administrasi perburuhan dan lembaga tripartit. Krisis ekonomi yang memperburuk kondisi ekonomi dan sosial mendorong kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja dan program pemulihan di mana ILO telah menjadi mitra aktif.

Kemajuan yang dicapai dalam penerapan Program-program di Tingkat Negara sangatlah tergantung pada kerja sama yang dilakukan bersama pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi kemasyarakatan serta masyarakat donor. Keberhasilan dalam melakukan pekerjaan penting ini akan selalui menjadi keberhasilan bersama dengan semua pihak yang memiliki komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*pemred*

## daftar ISI

### 2 Dari KAMI

### 3 Liputa Utama

Meraih Masa Depan tanpa Pekerja Anak di Asia Pasifik

#### Pekerja Anak

### 4 Strengthening Communities to Tackle Child Drugs Traffickers

### 4 Dampak Putus Sekolah Dini dan Pekerja Anak di Indonesia: Temuan-temuan Kunci

**Pemimpin Redaksi:** Alan Boulton

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Peter Rademaker

**Editor Eksekutif:** Gita Lingga

**Koordinator Editorial:** Gita Lingga

**Alih Bahasa:** Gita Lingga

**Sirkulasi:** Budi Setiawati

**Kontributor:** Asenaca Colawai, Carmelo Noriel/ Lusiani Julia, Christianus Panjaitan, Dede Shinta Sudono, Djoa Sioe Lan, Galuh S. Wulan, Gloria J. Panjaitan, Gita Lingga, Idauli Tamarin, Lotte Kejsler, Parissara Liewkeat dan Rolly Damayanti.

**Desain & Produksi:** Ikreasi

Warta ILO Jakarta

Menara Thamrin Building

Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia

Telp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766

Email: Jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/jakarta

reDAKSI

### Hak-hak dalam Bekerja

#### 7 Dua Seniman Musik Jadi Duta Buruh Migran Indonesia

#### 8 Staf Diplomatik Indonesia Dilatih tentang Hak Pekerja Migran

#### 9 Forum Tripartit Bahas Mekanisme dan Sistem Sub-kontrak (*Outsourcing*) di Indonesia

#### 8 Mengkaji Sistem Upah Minimum di Indonesia

#### 9 Meningkatkan Daya Saing, Menciptakan Lapangan Kerja

### Ketenagakerjaan

#### 10 Membangun Kembali Yogyakarta dan Jawa Tengah

#### 11 Mengelola Kembali Usaha setelah Tsunami

#### 21 Pelatihan berbasis Kompetensi untuk Masa Depan yang Menjanjikan

#### 21 Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Pelatihan Memulai Usaha

#### 13 Memberdayakan Masyarakat Papua melalui Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas

### Perlindungan Sosial

#### 14 Meningkatkan Pelatihan Pra Keberangkatan “Migrasi yang Aman Selamatkan Kehidupan”

#### 15 Orang Hidup dengan HIV/AIDS Dilatih Memulai Usaha Sendiri

### Dialog Sosial

#### 16 Sekilas: Dukungan untuk Pekerja

### Timor Leste

#### 20 ILO Dukung Pemulihan Timor Leste dari Konflik

#### 22 Cuplikan

#### 17 Buku

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali dalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

# Meraih Masa Depan tanpa PEKERJA ANAK di Asia Pasific

"SEMINAR ini memainkan peranan penting dalam membangun komitmen politik yang lebih kuat lagi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan pendidikan. Karenanya, saya mengajak negara-negara peserta untuk bersama-sama menanggulangi masalah pekerja anak melalui program kegiatan terpadu, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik," demikian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, pada Rabu (12/7) saat membuka Regional Seminar ILO/Jepang se-Asia Pasifik mengenai Penghapusan Pekerja Anak di Jakarta.

Ia pun menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi pekerja anak. "Kami telah berkomitmen mengambil langkah-langkah segera. Menyusul ratifikasi Konvensi ILO, RAN tersebut memaparkan secara rinci prioritas dan strategi penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak yang terbagi dalam tiga tahap selama rentang waktu 20 tahun. RAN pun memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di semua tingkatan," Menteri Erman menjelaskan.

RAN mengidentifikasi lima bentuk terburuk pekerjaan untuk anak sebagai sasaran langsung: anak-anak yang terlibat penjualan, pembuatan dan perdagangan obat-obat terlarang, perdagangan anak untuk dilacurkan, pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai, di pertambangan, dan di sektor alas kaki.

Seminar ini dihadiri perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 11 negara di Asia dan Pasifik untuk menganalisis langkah-langkah penanggulangan pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya, sejalan dengan pelaksanaan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Deklarasi ini telah diterima secara luas sebagai standar universal mengenai hak-hak asasi di tempat kerja.

Selama seminar tiga hari ini, para peserta membahas secara mendalam program dan tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai upaya menghapuskan pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya, serta mengarusutamakan masalah pekerja anak ke dalam kerangka kebijakan nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan pendidikan untuk semua. Mereka pun menelaah langkah dan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak.

Guy Thijs, Direktur ILO-IPEC Jenewa, menegaskan bahwa dalam abad ke-21, tidak seorang anak pun boleh tereksplotasi ataupun ditempatkan di pekerjaan berbahaya.



© ILO

"Tidak seorang pun boleh terhambat aksesnya terhadap pendidikan. Tidak seorang pun berhak diperbudak untuk bertahan hidup. Mari kita terus memperjuangkan hak bagi semua anak untuk dapat menikmati masa kanak-kanak mereka. Kendati upaya menghapuskan pekerja anak masih menjadi tantangan, saya percaya kita sudah berada di jalur yang benar."

“Seminar ini memainkan peranan penting dalam membangun komitmen politik yang lebih kuat lagi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan pendidikan. Karenanya, saya mengajak negara-negara peserta untuk bersama-sama menanggulangi masalah pekerja anak melalui program kegiatan terpadu, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik.”

Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Sebagai bagian dari program, para peserta mengunjungi salah satu kegiatan proyek ILO di Ciomas, Bogor, untuk melihat penggunaan pekerja anak di industri alas kaki. Dikenal sebagai Bengkel Alas Kaki, Kabupaten Ciomas merupakan rumah dari ratusan bengkel sepatu dan sandal. Banyak anak-anak setempat bekerja di industri ini, sebagian bekerja paruh waktu setelah sekolah, sedangkan mereka yang putus sekolah bekerja penuh waktu. Terdapat sekitar 2.000 bengkel

di Kabupaten yang memiliki 11 desa ini.

Staf ILO di Ciomas, Mediana Dessy, menjelaskan bahwa banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah di tingkat sekolah dasar karena harus membantu orangtua mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka, berusia sembilan hingga 17 tahun, menghabiskan hampir keseluruhan hari-hari mereka di bengkel, dengan hanya memperoleh sebagian kecil pendapatan yang diperoleh orangtua atau pekerja dewasa lainnya.

"Saya senang dapat memberikan uang ke ibu saya, itu cukup buat saya," Mohamad Hendar, 11 tahun, yang putus sekolah di kelas tiga sekolah dasar, seperti dikutip dari the Jakarta Post. Ia bertanggungjawab mengelem bagian-bagian sepatu dan memperoleh Rp 15.000 (US\$1.63) setiap minggu.

Namun, ia mengakui kerap kali merasa pusing akibat bau lem. Jenis lem yang digunakan menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti *toluene*, *methyl ethyl ketone* and *acetone*, yang dapat menimbulkan kecanduan dan masalah kesehatan yang serius.

Berada di dalam rumah, kondisi bengkel umumnya sempit dengan kondisi kebersihan yang buruk. Hasil kajian memperlihatkan bahwa mayoritas bengkel tidak memiliki jendela untuk ventilasi, cahaya yang tidak memadai, kabel listrik dan penggunaan alat-alat listrik yang tidak aman, serta kurangnya alat pemadam kebakaran. Para pekerja seringkali



dari kiri ke kanan: Guy Thijs, Direktur ILO-IPEC Jenewa; Yoshihiro Senoo, Asisten Direktur Jenderal untuk Urusan Luar Negeri Pemerintahan Jepang dan ; Erman Soeparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

harus bekerja dalam posisi yang merugikan kesehatan, seperti berjongkok atau duduk bersila di lantai. Mereka pun tidak disediakan alat pelindung diri yang memadai seperti sarung tangan atau masker.

Patrick Quinn, Kepala Penasihat Teknis dari Program Pekerja Anak ILO, menjelaskan bahwa ILO mengawasi kondisi para pekerja anak di Ciomas sejak Juni 2005. "Target kami adalah pada 2016 tiada lagi anak-anak di bawah umur yang bekerja di bengkel-bengkel. Saat ini, Organisasi kami dan para mitranya menerapkan pendekatan persuasif untuk mengembalikan anak-anak ini ke bangku sekolah," kata dia.

Seorang peserta dari Jepang, Yashusi Korube, mengatakan bahwa pekerja anak tidak lagi menjadi permasalahan di Jepang. "Mungkin 20 tahun lalu, kami masih memiliki masalah pekerja anak," kata dia. Ia menyatakan kegembiraannya dapat melihat sendiri kehidupan dan kondisi kerja para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di bengkel percontohan. "Saya kini dapat mengatakan ke orang-orang bahwa mereka dapat menggunakan produk yang dihasilkan."

Di Indonesia, terdapat hampir 4 juta anak di bawah 15 tahun yang tidak bersekolah dan 1,5 juta di antaranya bekerja. Jumlah pekerja anak dan putus sekolah terbesar berada di daerah pedesaan.

Negara-negara yang akan hadir dalam seminar ini adalah: Kamboja, Republik Rakyat Cina, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Deklarasi yang diadopsi pada 1998 merupakan tanggapan ILO terhadap tantangan-tantangan yang ditimbulkan proses globalisasi. Deklarasi memuat prinsip-prinsip dasar ILO, yang telah disepakati di berbagai pertemuan internasional pada tahun 1990-an. Deklarasi mewajibkan negara-negara anggota untuk menghormati, mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang menyangkut hak-hak mendasar kebebasan berserikat dan hak untuk perundingan bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

## Peringatan Hari Anti Madat Internasional: Memperkokoh untuk Atasi **pengedar**

**MENANDAI** peringatan Hari Anti Madat Internasional (HANI), ILO), bersama dengan Yayasan Pelita Ilmu (YPI) dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, menggelar sebuah lokakarya mengenai "Program Berbasis Masyarakat guna Menangani Anak-anak yang Terlibat dalam Peredaran Narkoba", pada 22 Juni di Jakarta.

Program ini disasarkan kepada para orangtua dan anak-anak dari masyarakat miskin perkotaan melalui berbagai layanan, seperti perpustakaan, tes kesehatan berkala bagi anak-anak dan orangtua, konseling narkoba, kegiatan seni dan olahraga. Sanggar ini pun bertujuan memperkokoh sistem pencegahan dan rujukan yang dirancang untuk anak-anak pencandu narkoba dan kapasitas para anggota keluarga, terutama para ibu, tentang bagaimana mencegah dan mengatasi masalah narkoba.

"Kegiatan ini telah menjangkau sekitar 850 anak dan mendampingi 66 anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Diharapkan kegiatan ini dapat memutuskan rantai peredaran narkoba yang melibatkan anak-anak di bawah umur, terutama dengan melibatkan peran dari pendidik sebaya serta dengan meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya," ujar Patrick Quinn, Kepala Penasihat Teknis Proyek Penanggulangan Pekerja Anak ILO.

ILO melalui Program Internasional Penanggulangan Pekerja Anak menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga, seperti Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Yayasan SEKAM, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dalam bentuk pelaksanaan program-program aksi ini yang terfokus pada

### Mayoritas Anak Pengguna Narkoba Juga Terlibat dalam Peredaran

**HASIL** penelitian ILO pada 2005 memperlihatkan bahwa lebih dari 92 persen anak berusia di bawah 18 tahun di wilayah Jakarta Pusat dan Barat yang menjadi pengguna atau pernah menggunakan narkoba juga terlibat dalam peredaran narkoba. Mereka mulai terlibat pembuatan dan peredaran sejak di usia antara 13 dan 15 tahun saat masih bersekolah ataupun putus sekolah dari sekolah dasar dan menengah pertama.

Anak-anak yang berada di lingkungan pengguna dan pengedar narkoba serta anak pengguna narkoba, kendati sekadar coba-coba, merupakan kelompok paling rentan terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba. Mereka umumnya putus sekolah di tingkat menengah pertama akibat tingginya biaya pendidikan, perkelahian atau terlibat narkoba. Kebanyakan terlibat

# Komunitas narkoba anak

“Sanggar ini pun bertujuan memperkokoh sistem pencegahan dan rujukan yang dirancang untuk anak-anak pencandu narkoba dan kapasitas para anggota keluarga, terutama para ibu, tentang bagaimana mencegah dan mengatasi masalah narkoba”

pencegahan dan penarikan melalui tiga pendekatan: Pendekatan komunitas dan kesehatan, Pendekatan berbasis jalanan dan Pendekatan berbasis sekolah.

“Ketiga pendekatan ini dinilai efektif dalam mencegah keterlibatan anak penggunaan narkoba serta menarik anak dari peredaran. ILO terus mendukung pendekatan ini serta prakarsa lainnya guna membebaskan anak dari jeratan peredaran narkoba,” demikian disimpulkan Patrick.

©ILO



Peringatan Hari Anti Madat Sedunia di Jakarta, tanggal 26 Juni 2006

©ILO



dalam penggunaan obat-obatan terlarang sejak usia 12 tahun yang diawali dengan merokok, alkohol, dan mengisap lem. Pada usia 15 –16 tahun, kegiatan

meningkat dengan menggunakan ganja, heroin, ekstasi dan shabu. Heroin dan ganja merupakan jenis obatan-obatan yang populer di pengguna narkoba anak.

Keterlibatan sebagai pengedar umumnya dilakukan saat berusia 15 tahun dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan tambahan (berkisar antara Rp 40.000 – Rp 200.000 per bulan) dan mendapatkan obat-obatan secara gratis. Besarnya pendapatan tersebut sangat tergantung pada jenis obat-obatan yang dijual, jumlah dan peranan mereka. Mayoritas pengedar anak ini berkeinginan untuk berhenti dan lebih memilih melakukan pekerjaan lain apabila memiliki

pilihan. Meninggalkan wilayah Jakarta, serta dukungan kuat dari keluarga dan masyarakat, membantu mereka meninggalkan pengedaran narkoba.

# Menteri Erman Suparno Soroti Kemajuan Ketenagakerjaan di Indonesia

**MENTERI** Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, menyampaikan pidatonya di Konferensi Perburuhan Internasional, yang diadakan pada 31 Mei – 16 Juni, menggarisbawahi perkembangan dan kemajuan terakhir berkenaan dengan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya yang ditujukan pada penghapusan pekerja anak serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Lebih dari 3.000 delegasi pemerintah, pengusaha dan pekerja menghadiri konferensi tahunan ke-95 yang dihadiri 178 negara Anggota ILO, membahas beragam permasalahan dari perubahan pola dalam dunia kerja hingga pekerja anak, K3, hubungan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta kondisi kerja di Myanmar dan negara-negara lain.

Dalam sambutannya pada 5 Juni, Menteri Suparno menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan kemajuan berarti berkenaan dengan Deklarasi ILO 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja serta Tindaklanjutnya. Ia menekankan bahwa kemajuan pelaksanaan hak asasi di tempat kerja sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia.

"Indonesia, sebagai negara yang mengalami transformasi besar sebagai upaya menjadi masyarakat demokratis sepenuhnya akan selalu mendukung langkah-langkah internasional yang mendorong kemitraan sosial yang kuat dan dinamis. Prinsip-prinsip ini menjadi prioritas tripartit yang tercermin dalam peraturan perundangan kami."

Ia menyoroti dampak globalisasi ekonomi yang terjadi di seluruh belahan dunia dengan apa yang disebutnya sebagai "permasalahan yang tiada habisnya, khususnya terkait dengan memperoleh penghasilan dan kesejahteraan masyarakat". Ia pun menegaskan bahwa pengangguran masih menjadi masalah besar. "Untuk alasan inilah, Indonesia mendorong hubungan yang kuat dan dinamis dengan masyarakat internasional guna mengatasi permasalahan ini melalui iklim investasi yang lebih baik."

Berkenaan dengan masalah pekerja anak, Menteri mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah segera. Dunia kerja harus terbebaskan dari segala tindakan eksploitasi terhadap anak-anak, kata dia dengan



Juan Somavia, Direktur Jenderal ILO dan Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada saat Konferensi Perburuhan Internasional ke 95.

© ILO

menyontohkan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia sebagai sebuah contoh program yang baik.

Guna memasyarakatkan K3, ia melanjutkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Sistem Manajemen K3 sejak 1996. Melalui penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, Sistem K3 harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban setiap perusahaan. Indonesia pun menyambut baik prakarsa ILO untuk membahas mengenai Kerangka Kerja Pelaksanaan K3 sebagai perangkat baru, ia menambahkan.

Ia pun menegaskan pentingnya memadukan program pelatihan, sertifikasi dan penyaluran kerja untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperoleh pekerjaan layak. "Konsep tiga dalam satu yang terpadu berupa pelatihan, sertifikasi, dan penempatan saya yakini dapat menciptakan peluang kerja dan menghapuskan kemiskinan.

## Dampak

## PUTUS SEKOLAH DINI DAN PEKERJA ANAK di Indonesia

**MENANDAI** Hari Anti Pekerja Anak se-Dunia pada 12 Juni, ILO-IPEC meluncurkan hasil temuan survei terbaru yang menelaah kondisi ketenagakerjaan orang muda di Indonesia. Kaum muda Indonesia yang putus sekolah sebelum menamatkan pendidikan menengah pertama cenderung berpendapatan rendah saat usia dewasa, lebih rentan terhadap pengangguran dan bekerja di bidang pekerjaan yang kurang aman dan pasti.

Mengomentari laporan tersebut, Deputy Direktur ILO Jakarta Peter Rademaker mengatakan bahwa temuan-temuan utama survai ini, yang didukung data-data terkait lainnya, memberikan bukti nyata bahwa terdapat sejumlah besar penganggur muda, yang banyak di antaranya tidak berpendidikan dan berketerampilan rendah, tidak memiliki kecakapan kerja.

"Masalah ini harus disikapi dengan mempromosikan pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka, namun akan menjadi investasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia."

## Temuan Kunci

Di antara temuan-temuan pokok penelitian ini adalah:

✎ Dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional sebesar 10,4 %, sekitar 66% orang muda berusia 17-18 tahun yang putus sekolah menganggur, dengan kisaran menurun menjadi sekitar 53% untuk usia 19-20 tahun dan 20% untuk usia 23-24.

## Dua Seniman Musik Jadi Duta Buruh Migran Indonesia

**LEBIH** dari satu dekade belakangan ini, Indonesia telah menjadi negara pemasok pekerja migran terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara eksportir tenaga kerja terbesar kedua setelah Filipina. Kendati para pekerja migran ini merupakan penyumbang devisa terbesar kedua, sekitar US\$ 1,1 hingga US\$ 2,2 triliun, banyak dari mereka yang masih mengalami eksploitasi dan kekerasan di seluruh proses penempatan baik secara ekonomi, fisik, psikologis maupun seksual.

Agar kesejahteraan para pekerja migran lebih terlindungi serta aspirasi mereka lebih terdengar, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), bersama dengan ILO, mendeklarasikan dua bintang di blantika musik Indonesia, Franky Sahalutua dan Nini Carlina, sebagai Duta Buruh Migran Indonesia pada Kamis, 13 Juni.

Kedua bintang ini ditunjuk berdasarkan kiprah mereka selama ini dalam terlibat dan membela kepentingan serta hak pekerja, khususnya pekerja migran, serta berdasarkan keinginan langsung para pekerja migran yang merasa terwakili dengan karya-karya mereka ataupun karena kedekatan asal wilayah mengingat Nini Carlina, misalnya, berasal dari daerah asal mayoritas pekerja migran.

Sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia, keduanya bertugas mengampanyekan hak-hak pekerja migran, memberikan informasi dan pemahaman seluas mungkin mengenai permasalahan terkait pekerja migran Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para calon pekerja migran. Mereka pun mewakili para pekerja migran menyuarakan aspirasi mencakup masalah perlindungan sejak mendaftarkan diri hingga kepulangan serta memastikan



Nini Carlina

pelaksanaan pelayanan yang memadai untuk calon pekerja migran seperti sistem dan proses perekrutan, pembiayaan, perjanjian kerja, mekanisme ganti rugi dan hukum serta pelatihan.

Acara bertajuk "Buruh Migran Pahlawan Devisa atau Komoditi?" ini akan dilanjutkan dengan dialog publik mengenai pentingnya perlindungan terhadap para pekerja migran, mengingat sumbangan besar yang diberikan kepada negara. Dialog ini menampilkan para pemerhati masalah seputar pekerja migran seperti Rafendi Jamin dari *Human Rights Watch Group* dan Bonny Setiawan dari *Institute Global of Justice*.

✍ Putus sekolah dari pendidikan dasar umumnya disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan. Sekitar 33% meninggalkan sekolah sebelum menamatkan pendidikan menengah pertama dan 20% mulai bekerja.

✍ Penelitian ini menemukan tingkat pengangguran yang sangat besar di antara mereka yang putus sekolah di kelompok usia 15-17 tahun (71%), di mana besarnya berkurang secara berangsur-angsur hingga kaum muda mencapai usia 23-24 tahun (20%)

✍ Di antara mereka yang bekerja dan bekerja mandiri, penelitian menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara mereka yang menamatkan pendidikan menengah pertama dengan yang tidak. Di antara mereka yang bekerja, penghasilan yang diperoleh kelompok yang menyelesaikan pendidikan mereka sekitar 56% lebih tinggi, sementara untuk yang bekerja mandiri 39% lebih besar.

✍ 85% pekerja berusia 15-17 tahun bekerja tanpa kontrak. Mereka yang menyelesaikan pendidikan menengah

pertama tiga kali lebih besar kemungkinannya memperoleh pekerjaan dengan kontrak yang jelas dibandingkan dengan mereka yang putus sekolah.

✍ 33% responden menjawab YA untuk pertanyaan "Apakah Anda pernah merasa bahwa cara anda mencari uang/ penghidupan mengandung risiko untuk keselamatan anda (seperti bekerja di jalan, pada malam hari atau pada kondisi berbahaya, dll)".

✍ Hanya segelintir orang muda pernah menerima penyuluhan karier, dan bagi yang menerima, mereka menganggapnya sangat berguna.

✍ Mereka yang putus sekolah cenderung untuk menikah dan memiliki anak pertama rata-rata dua tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. Pernikahan dan kelahiran anak dini dapat menjadi faktor penyebab terjebaknya mereka dalam kemiskinan di masa mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru.

# Staf Diplomatik Indonesia dilatih tentang Hak Pekerja Migran

© ILO



Alan Boulton, Country Director of ILO in Indonesia, and Imron Cotan, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs.

**DEPARTEMEN** Luar Negeri dan ILO menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Pelatihan Staf Diplomatik tentang Hak dan Tanggung Jawab atas Pekerja Migran pada 10 Juli di Jakarta. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat respons kedutaan terhadap pekerja migran Indonesia yang terjebak di dalam perdagangan, kerja paksa dan kondisi buruk di negara tujuan.

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan bahwa **pelatihan ini memainkan peranan penting dalam melengkapi staf Layanan**

## MENGAJI SISTEM UPAH MINIMUM di Indonesia

**UPAH** minimum selalu merupakan pertanyaan yang sulit, kompleks and kontroversial khususnya di negara-negara berkembang. Upah minimum dapat terlalu tinggi bagi banyak pengusaha dan pengamat ekonomi; sementara, dinilai terlalu rendah bagi kebanyakan pekerja, serikat pekerja and aktivis sosial. Karenanya, Proyek Hubungan Industrial ILO menyelenggarakan forum sehari bertajuk "Perbandingan Sistem Penentuan Upah Minimum dan Pengupahan" pada April.

Forum ini bertujuan membahas perbandingan sistem penetapan upah dan pengupahan di berbagai negara dan mengkaji kondisi serta kekuatan dan kelemahan sistem penetapan upah dan pengupahan di Indonesia, selain juga mengidentifikasi prioritas kebutuhan dan perangkat untuk menyikapi masalah ini.

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, menyatakan bahwa upah minimum merupakan salah satu kebijakan pasar kerja terpenting di banyak negara, sebab penerapannya

**Luar Negeri dengan perangkat-perangkat yang secara efektif menanggulangi kasus-kasus dan situasi-situasi khusus serta terlibat dalam upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya perdagangan dan kerja paksa.** "Hal ini pun dapat mencegah eksploitasi pekerja migran Indonesia dengan menjamin akses terhadap dukungan dan bantuan cepat dan sensitif dari kedutaan-kedutaan."

Sebagai langkah lanjutan segera, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri akan mengintegrasikan dan memasukkan modul pelatihan bertajuk "Pelatihan tentang Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri: Melindungi Hak-hak Asasi" ke dalam Pelatihan Diplomatik Junior, Menengah, serta Senior.

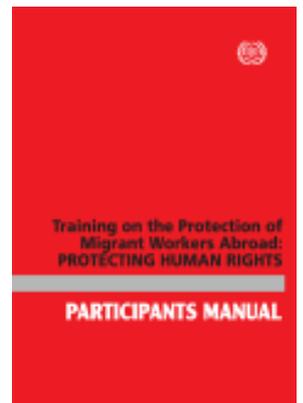
Di tingkat junior, isi pelatihan ditekankan pada situasi dan eksploitasi yang dihadapi pekerja migran, sementara pemahaman mengenai hak-hak pekerja migran diberikan pada tingkat menengah. Peserta di tingkat lanjutan diharapkan menguasai permasalahan terkait pengawasan dan penyusunan strategi jangka panjang. Modul-modul mengenai Perlindungan Pekerja Migran mencakup semua aspek permasalahan yang dihadapi pekerja migran, dan terbukti dapat segera diterapkan di tingkat operasional.

Selanjutnya, sebelum penandatanganan, sejumlah pelatihan regional diselenggarakan bagi staf diplomatik di tingkat junior, menengah dan senior serta duta besar di Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Jeddah.

memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimum. "Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan pengupahan yang layak merupakan perhatian utama ILO sebagai upaya memerangi konflik sosial dan mempromosikan perdamaian," ujar dia.

Kepala Program Kondisi Kerja dan Ketenagakerjaan ILO Jenewa, Francois Eyraud, akan memaparkan tinjauan komparatif mengenai dasar-dasar penetapan upah minimum serta perbandingan praktik dan pengalaman antarnegara. Ia akan didampingi Bambang Widiyanto, Deputi Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah Bappenas, dan Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang akan memaparkan tinjauan kondisi ekonomi dan penetapan upah minimum di Indonesia.

Forum serupa pun diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 April.



## Forum Tripartit Bahas Mekanisme dan Sistem Sub-kontrak (*Outsourcing*) di Indonesia

ILO di bawah Proyek Deklarasi mengenai Hubungan Industrial di Indonesia menggelar forum satu hari, "Tren Internasional tentang Hubungan Ketenagakerjaan termasuk Sub-kontrak", pada Mei. Forum ini bertujuan memberikan kesempatan untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman dalam penyusunan kebijakan nasional guna mengembangkan mekanisme yang tepat sebagai upaya menyikapi cepatnya perubahan dan perkembangan pasar kerja dan pengaturan kerja.

Tujuan-tujuan ini sejalan dengan agenda sesi ke-95 Konferensi Perburuhan Internasional 2006 yang akan diselenggarakan pada Juni di Jenewa berkenaan dengan permasalahan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan pilar dari standar ketenagakerjaan nasional dan internasional, serta prinsip-prinsip Deklarasi ILO.

Dalam diskusi, Hassanuddin Rachman, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menegaskan bahwa sistem sub-kontrak (*outsourcing*) memainkan peran penting apabila Indonesia menginginkan industri yang lebih efisien dan kompetitif. "Globalisasi dalam sektor melahirkan penyebaran kerja yang luas di seluruh dunia dan hal ini tidak terhentikan. Bahkan Amerika Serikat merumuskan sebuah peraturan yang melarang negara-negara bagian untuk menyubkontrakkan jenis-jenis pekerjaan tertentu ke negara lain, tapi peraturan itu sama sekali tidak berjalan," ujar Hassan.

Namun, Rekson Silaban, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), mengingatkan bahwa keamanan kerja semakin rendah bagi para pekerja sejak membubungnya harga bahan bakar di bulan November. Membiarkan membesarnya kerja sub-kontrak hanya akan membuat masa depan para pekerja semakin tidak menentu, kata dia. "Outsourcing hanya dapat diterima apabila pelaksanaannya diatur dengan ketat, tingkat upah minimum ditingkatkan dan program jaminan sosial diperbaharui untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau memasuki masa pensiun."

Carmelo Noriel, Kepala Penasihat Teknis Proyek Hubungan Industrial ILO, menegaskan bahwa tujuan dari

kebijakan pasar kerja dan ketenagakerjaan harus mampu mewujudkan hak-hak setiap warga negara untuk bekerja atau masuk ke dalam pasar kerja. "Studi-studi ILO menemukan adanya hubungan yang positif antara peraturan pasar kerja dan kondisi kerja. Karenanya, menemukan upaya untuk memastikan pengembangan kebijakan yang inovatif yang dapat mengelola pasar kerja secara lebih baik dari sudut pandang ekonomi dan sosial menjadi penting," ujar dia.



© ILO

Forum pun menghadirkan Konsultan ILO mengenai Hubungan Ketenagakerjaan, Enrique Marin. Ia memaparkan tinjauan komparatif berkenaan dengan tren internasional mengenai hubungan kerja, termasuk permasalahan terkait sub-kontrak, dan perbandingan antarnegara serta pengalaman terkait mekanisme hubungan kerja. Forum dihadiri sekitar 120 peserta dari departemen pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, kamar dagang internasional, lembaga internasional dan nasional dan sebagainya.



© ILO

### MENINGKATKAN DAYA SAING, Menciptakan Lapangan Kerja

**GLOBALISASI** memperbesar kebutuhan setiap orang (pemerintah, pekerja dan pengusaha) untuk senantiasa berupaya meningkatkan daya saing mereka. Lokakarya satu hari digelar pada Mei, menyoroti masalah mengenai mempromosikan kondisi dan manajemen kerja yang layak dan produktif yang dapat mengarah pada meningkatnya produktivitas dan daya saing. Lokakarya ini pun menegaskan dibutuhkan untuk bersaing dalam hal kualitas, biaya, waktu dan hasil dalam kondisi yang tepat, dan kebutuhan untuk membantun manajemen kerja yang menciptakan semacam kemitraan yang dapat mendorong sistem organisasi kerja yang lebih produktif, manusiawi, dan demokratis yang berujung pada kualitas hasil kerja.

# MEMBANGUN KEMBALI

## Yogyakarta dan Jawa Tengah



**MENYUSUL** bencana gempa bumi pada 27 Mei di Yogyakarta dan Jawa Tengah, ILO mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra sosialnya mengkaji kerusakan terkait ketenagakerjaan dan mata pencaharian. Gempa bumi berskala 6,3 Richter ini mengakibatkan kerusakan besar, terutama di Kabupaten Bantul dan Klaten.

Lebih dari 130.000 pekerjaan terkena dampak bencana ini, serta setidaknya menghilangkan nyawa sekitar 6.000 jiwa, melukai ratusan ribu orang serta menghancurkan sekitar 400.000 rumah. Mereka yang kehilangan mata pencaharian umumnya para pedagang, termasuk pedagang di ekonomi informal. Lebih dari 650.000 orang bekerja di sektor-sektor yang terkena bencana, dengan sekitar 90% kerusakan dan kehilangan terjadi di perusahaan kecil menengah. Diperkirakan kerugian mencapai Rp 29,1 triliun (US\$ 3,1 miliar).

ILO saat ini mendukung upaya pemulihan, dengan memberikan kursus singkat mengenai pelatihan keterampilan berkenaan dengan pekerjaan konstruksi di lapangan, berdasarkan pengalaman dari respons atas bencana tsunami di Aceh. ILO pun berupaya menghidupkan kembali perekonomian setempat dengan beragam upaya. Keterampilan seperti itu akan memungkinkan masyarakat membangun kembali rumah-rumah dengan kondisi lebih kuat, mengingat kerusakan banyak terjadi di bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan acuan bangunan yang aman dan metode pembangunan yang tahan gempa.

“Hilangnya pekerjaan dan pendapatan akan mengakibatkan banyak orang menghadapi kemiskinan. Hampir sekitar 880.000 kaum miskin tinggal di daerah yang terkena bencana gempa, dan diperkirakan sekitar 66.000 lainnya jatuh ke dalam kemiskinan. Yang harus segera dilakukan adalah mengembalikan masyarakat ke dunia kerja dan membantu masyarakat yang terkena bencana memperoleh peluang kerja selama proses pembangunan dan rehabilitasi kembali,” ujar Peter Rademaker, Deputi Direktur ILO di Indonesia.

Untuk mendukung penggunaan teknologi padat karya dan mempromosikan pembangunan kapasitas para pekerja konstruksi, ILO menggelar pelatihan untuk pelatihan tentang kerja konstruksi lapangan pada 19 – 21 Juni 2006. Pelatihan diselenggarakan bersama Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY Yogyakarta bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya untuk memberikan dan meningkatkan keterampilan para pelatih utama mengenai kerja konstruksi lapangan.

Sekitar 14 pelatih utama terpilih berpartisipasi dalam pelatihan ini. Sebagai tindak lanjut, mereka diharapkan menggelar pelatihan serupa bagi masyarakat setempat yang terkena gempa, khususnya di dua daerah yang paling mengalami kerusakan berat, Kabupaten Bantul dan Sleman. Pelatihan ini didasarkan pada pekerja konstruksi, pengawas/mandor konstruksi, pemuka masyarakat, organisasi pemuda, dan LSM terkait lainnya. Saat ini sebanyak 240 orang telah dilatih di tingkat perdesaan di wilayah Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

© ILO

**“ Yang harus segera dilakukan adalah mengembalikan masyarakat ke dunia kerja dan membantu masyarakat yang terkena bencana memperoleh peluang kerja selama proses pembangunan dan rehabilitasi kembali. ”**

Peter Rademaker, Deputi Direktur ILO di Indonesia

# MENGELOLA KEMBALI USAHA setelah Tsunami

DARWIS, 27 tahun, tinggal di Desa Deah Glumpang, Kabupaten Meuraxa, Banda Aceh, dan memiliki sebuah toko kelontong kecil yang cukup berhasil sebelum tsunami memporak-porandakan desanya dan menghancurkan toko. Saat masyarakat mulai menata kembali kehidupan mereka, dan kebutuhan akan toko-toko kelontong meningkat, ia berniat membuka kembali usahanya. Sayangnya, ia masih kesulitan modal.

Namun, setelah berpartisipasi dalam pelatihan manajemen usaha ILO, Memulai Usaha Anda (Start Your Business/SYB), Darwis menyadari bahwa diperlukan lebih dari sekadar modal untuk menjalankan usaha yang berhasil. Ia menemukan bahwa perencanaan yang baik sangat diperlukan sebelum memulai usaha. Ia pun kemudian menyatakan, "Melalui pelatihan SYB, saya banyak belajar mengenai cara mengatur uang, administrasi dan akuntansi. Sekarang saya tahu cara mencatat uang masuk dan keluar dan bisa menghitung keuntungan yang sebenarnya."

Pelatihan yang dilaksanakan sebagai bagian dari program bersama PBB antara UN Habitat dan ILO di bawah program Pemulihan/Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economic Recovery/Development/LER/D*). Komponen LER/D membuka peluang bagi masyarakat atas fasilitas perumahan yang disediakan UN Habitat untuk digunakan sebagai tempat usaha (toko atau bengkel) yang berdekatan dengan rumah mereka. Untuk itu, mereka harus melalui proses seleksi yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman (BQB), bank syariah setempat, yang menyediakan pinjaman atau penyewaan untuk memulai usaha kembali. Mereka yang terpilih kemudian mengikuti pelatihan SYB agar mampu mengembangkan sebuah rencana usaha sederhana dan lebih berpeluang mengakses layanan jasa keuangan.

Sergei Muzyka, Kepala Penasihat Teknis untuk Kewirausahaan Muda, menegaskan pentingnya pendekatan terpadu. "Hanya dengan menjalankan tiga komponen terpadu—latihan kerja dan pengembangan keterampilan, pelatihan manajemen usaha, dan akses atas keuangan mikro—kami dapat mengharapkan penciptaan kerja melalui pengembangan usaha kecil dan mikro," dia menjelaskan. Para instruktur dari program Pelatihan Kerja ILO membantu pengawasan kualitas konstruksi, sementara perusahaan-perusahaan yang dijalankan di bawah Pengembangan

Perempuan Pengusaha menyediakan batako untuk membangun tempat usaha.

Kelompok-kelompok masyarakat didirikan untuk berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Alexandre Halbwegs, Koordinator Lapangan Program, berkata, "Karena program ini ditujukan untuk komunitas, sangatlah penting untuk melibatkan mereka sejak awal." Kelompok-kelompok ini memainkan peranan penting dalam setiap tahap pengambilan

keputusan, dari perancangan arsitek hingga pengembalian dana. Di samping Deah Glumpang, program bersama ini juga diterapkan di Punge Jurong—kedua desa ini terletak di daerah pantai Banda Aceh.

Kini, Darwis berupaya membuka kembali tokonya, dan tidak hanya sekadar menjual beragam kebutuhan sehari-hari tapi juga peralatan melalui yang memang sangat dibutuhkan setelah tsunami. Senada dengan Darwis, Melia, 25 tahun, pun merasa gembira dapat segera memiliki sebuah toko permanen menggantikan toko sementara yang berlokasi di ruang tamu. Ibu dua anak ini harus membiayai sembilan orang yang kesemuanya menggantungkan diri ke toko sebagai penghasilan utama keluarga.

Di tengah tugas rumah tangga dan kewajiban menjalankan usaha, ia masih menyempatkan diri mengikuti pelatihan SYB dan mengakui manfaat besar yang diperolehnya. Ia pun melanjutkan "Para pelatih memahami posisi saya sebagai ibu.

Saya bergantian dengan suami dalam merawat anak-anak dan menjalankan toko. Terkadang saya membawa anak perempuan saya ke pelatihan dan para pelatih memperbolehkannya." Namun, ia mengakui bahwa menerapkan teori ke dalam praktik tidaklah mudah. "Saya masih berjuang memisahkan antara uang untuk keperluan usaha dan rumah tangga. Tapi, karena kondisi ekonomi sekarang, susah menolak pembeli secara cicilan. Saya berusaha mencatat seluruh utang-piutang."

Darwis and Melia adalah di antara mereka yang selamat dari bencana tsunami yang kini masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi mereka. Mengingat rendahnya prospeknya ketenagakerjaan di sektor formal dan tingginya permintaan akan barang dan jasa, memulai usaha menjadi pilihan yang memungkinkan bagi kaum muda untuk meningkatkan tidak hanya kesejahteraan mereka sendiri namun juga masyarakat sekitarnya.



Melia dan anaknya duduk di toko sementara.



Darwis

“...Sebelum [pelatihan Memulai Usaha Sendiri], saya hanya bisa melakukan penghitungan sederhana dalam menjalankan usaha. Saya hanya mencatat siapa saja yang berutang. Sekarang saya tahu cara mengatur keuangan dengan lebih baik. Saya juga tahu apa yang harus dibeli waktu mendapatkan modal...”

## Bahas PERATURAN PERLINDUNGAN Pekerja Rumah Tangga

MENGHADAPI terbatasnya tingkat pendidikan dan peluang kerja, pekerjaan rumah tangga menjadi pilihan sekitar 1,4 juta perempuan dan remaja putri perdesaan miskin sebagai salah satu dari segelintir upaya memperoleh pendapatan, dan sumber pelatihan keterampilan rumah tangga. Bagi rumah tangga Indonesia, mereka memberikan sumber layanan rumah tangga yang memang diperlukan.

Kendati pekerjaan yang mereka lakukan terbilang penting bagi para majikan, pekerja rumah tangga masih berada di luar jangkauan perlindungan hukum, seperti gaji, jam kerja, cuti, kondisi kerja, jaminan sosial dan sebagainya. Peraturan ketenagakerjaan Indonesia juga tidak memberikan pengawasan kerja serta perlindungan hukum atas tindak kekerasan yang dilakukan majikan. Selain itu, pasal-pasal mengenai tindak kriminal yang juga mencakup pekerja rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundangan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga jarang sekali diterapkan dalam kasus penganiayaan pekerja rumah tangga.

“... serta pekerja rumah tangga mudah tertipu akan jenis dan kondisi kerja. Alhasil, sejumlah besar perempuan dan remaja putri diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kendati sebelumnya dikatakan akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.”

©ILO

Data yang tersedia mengenai kondisi kehidupan dan kerja para pekerja rumah tangga melahirkan perhatian serius mengenai pelanggaran kerja, kerja paksa dan perdagangan yang dilakukan majikan dan perantara. Studi terbaru oleh Rumpun Gema Perempuan, sebuah LSM, menemukan bahwa 48% pekerja rumah tangga tidak pernah atau jarang sekali mendapatkan hari libur. 65% pekerja menerima upah lebih rendah dari Rp 300,000 per bulan dengan jam kerja rata-rata 12 jam per hari. Banyak dari mereka dibayar tidak tetap, sebagian atau tidak sama sekali, mengalami pengurangan gaji, dan makanan serta akomodasi yang tidak memadai. Selanjutnya, 93% dilaporkan mengalami kekerasan fisik (pemukulan, penjambakan, penganiayaan dengan setrika) dan 42% mengalami kekerasan seksual (pelecehan dan pemerkosaan).

Selain itu, sejumlah besar kasus rekrutmen, pengiriman dan rujukan kerja diorganisir oleh agen penyalur dan perorangan, serta pekerja rumah tangga mudah tertipu akan jenis dan kondisi kerja. Alhasil, sejumlah besar perempuan dan remaja putri diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kendati sebelumnya dikatakan akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.

Setiap tahunnya sejumlah besar pekerja rumah tangga teraniaya oleh majikan atau penyalur mereka disalurkan ke LSM yang memberikan layanan rehabilitasi dan bantuan hukum. Namun, kepolisian maupun pejabat berwenang lainnya umumnya tidak berkeinginan menginvestigasi keluhan dan laporan tindakan kekerasan yang dilakukan majikan atau agen penyalur, sementara peraturan hukum pidana dan sosial memberikan perlindungan yang minimal.

Untuk menyikapi permasalahan ini, Biro Hukum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), bersama dengan ILO, telah menyelenggarakan serangkaian lima konsultasi nasional selama April – Juni 2006, yang melibatkan lembaga dan organisasi terkait guna mendapatkan masukan mengenai rancangan peraturan nasional tentang pekerja rumah tangga. Untuk itu, Depnakertrans menyusun dan menelaah rancangan Perundangan Nasional mengenai Pekerja Rumah Tangga, yang di antaranya membahas mengenai masalah rekrutmen, kondisi kerja, jam kerja, cuti, kontrak, mediasi dan lain sebagainya.

LSM, seperti Rumpun Gema Perempuan, Jala PRT dan Rumpun Tjoet Njat Dien, menyelenggarakan dialog nasional dan lokal untuk memasyarakatkan mengenai masalah pekerja rumah tangga dan kebutuhan akan peraturan dan perlindungan hukum lainnya. Di parlemen, rancangan perundangan telah dibahas dan dipersiapkan untuk periode 2006 - 2007, sementara Depnakertrans dan LSM terus mempromosikan peraturan dan perlindungan hukum di tingkat nasional dan lokal dengan dukungan ILO.

# MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA melalui Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas



“...yang terpenting dari masyarakat adat Papua sendiri. Mereka sangat bersemangat mendukung dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek.”

© ILO

**MENANGGAPI** meluasnya kemiskinan dan marjinalisasi kalangan komunitas adat terpencil di Indonesia, ILO memprakarsai sebuah Proyek baru, Mempromosikan Keamanan dan Mengurangi Kemiskinan di kalangan Komunitas Adat Terpencil di Papua. Proyek ini akan berjalan selama tiga tahun, sejak awal tahun 2006. Bekerjasama erat dengan tiga departemen pemerintahan (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, dan Departemen Daerah Tertinggal), Proyek bertujuan memperkokoh mekanisme perdamaian mengingat masyarakat Papua menghadapi tantangan keamanan dan meningkatnya kemiskinan.

“Penduduk pendatang yang rentan pun menjadi sasaran Proyek ini, terutama untuk mengurangi ketegangan dan memerangi kemiskinan,” Gloria J. Panjaitan dari ILO Jakarta menjelaskan.

Untuk memastikan keberlanjutan, Proyek menerapkan pendekatan partisipatif berdasarkan komunitas di mana masyarakat adat terlibat langsung dalam keseluruhan siklus kegiatan Proyek. Hasil dari kegiatan percontohan di negara-negara lain, termasuk Filipina, mengindikasikan bahwa pendekatan ini dapat menjadi perangkat yang efektif untuk mempromosikan kemandirian di kalangan kelompok-kelompok yang termarginalisasi, terutama komunitas adat terpencil.

“Pendekatan ini mendapatkan penerimaan yang positif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah setempat, universitas, LSM, dan yang terpenting dari masyarakat adat Papua sendiri. Mereka sangat bersemangat mendukung dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek,” ujar Gloria.

Hingga saat ini, Nota Kesepakatan Bersama antara ILO dan Pemerintah Provinsi Papua sudah ditandatangani pada November tahun lalu. Sebagai tindaklanjut segera, empat kecamatan dipilih sebagai wilayah percontohan Proyek: Muara Tami di Kota Jayapura, Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura, serta Kebar dan Tanah Rubuh di Kabupaten Manokwari. Kegiatan dan program yang dilaksanakan terpusat pada tujuan-tujuan utama berikut:

- (1) Mempromosikan peluang kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui pengembangan keterampilan dan dukungan atas usaha kecil dan koperasi;
- (2) Berperan dalam layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah percontohan;
- (3) Mempromosikan kesetaraan jender, terfokus pada peranan kaum perempuan di komunitas adat terpencil; dan
- (4) Berperan dalam memperkuat mekanisme perdamaian dan pembangunan.

## Meningkatkan Pelatihan Pra Keberangkatan

# “MIGRASI YANG AMAN SELAMATKAN KEHIDUPAN”

LEBIH dari satu dekade belakangan ini, Indonesia telah menjadi negara pemasok pekerja migran terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara eksportir tenaga kerja terbesar kedua setelah Filipina. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) hingga Juni 2005, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 3.808.741 jiwa, dengan 72,5% di antaranya perempuan.

Menurut Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK), dari Januari – Oktober 2005, di antara 145.298 pekerja perempuan yang berangkat ke Timur Tengah, 131 orang positif HIV dan tidak dapat diberangkatkan ke luar negeri. Sejumlah faktor meningkatkan tingkat kerentanan pekerja migran atas HIV. Kondisi terentan adalah saat hidup dan bekerja dalam kondisi kemiskinan, terkucil, kesepian dan menyendiri.

Kaidah ILO mengenai HIV/AIDS dan Dunia Kerja mengidentifikasi kondisi-kondisi kerja yang mengakibatkan seorang pekerja lebih rentan terhadap infeksi HIV, yang umumnya banyak menimpa pekerja yang berpindah-pindah: kerap bepergian, hidup berjauhan dari pasangan, bekerja di lingkungan terpencil dengan interaksi sosial dan fasilitas kesehatan yang terbatas, bekerja dan tinggal di lingkungan hanya dengan kaum lelaki, dan bekerja di lingkungan mayoritas laki-laki dengan segelintir perempuan.

“Untuk para migran yang pindah ke komunitas baru, norma-norma sosial dan seksual mungkin saja berbeda dengan daerah asal mereka. Tanpa sistem dukungan yang diberikan keluarga dan masyarakat, perilaku berisiko cenderung

meningkat dan kemungkinan diwariskan kepada keluarga dan masyarakat daerah asal mereka,” ujar Galuh S. Wulan, Manajer Program Proyek ILO mengenai Pendidikan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Jam pelajaran yang dimandatkan Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan HIV bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri pun sangat dibatasi hanya satu jam dalam sesi pemberian informasi yang diberikan pada akhir pelatihan pra keberangkatan. Menyadari lemahnya kapasitas dari para pengajar terhadap permasalahan yang terkait HIV, ILO bersama dengan Depnakertrans, Asosiasi Penyalur Pekerja Migran (Apjati) dan sejumlah LSM di wilayah pengirim melakukan pelatihan. Serangkaian pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemampuan para pengajar di Balai Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (BLK-LN), kepala asrama serta staf lapangan LSM terkait migrasi.

Para pengajar BLK-LN kini memasukkan informasi HIV selama jam-jam pelajaran. Artinya, lebih dari satu jam pelajaran informasi HIV akan diberikan bagi pekerja migran Indonesia. LSM pun tidak hanya memberikan informasi mengenai HIV tapi juga mengenai bagaimana migrasi yang aman akan mengurangi tingkat kerentanan atas HIV yang dihadapi mereka. “Para pengajar BLK-LN di P.T. AUJ Jawa Timur, misalnya, menyampaikan informasi HIV dan AIDS kepada sekitar 250 calon pekerja migran yang menetap di asrama perusahaan,” kata Galuh.



© ILO

# ORANG HIDUP DENGAN HIV/AIDS

## Dilatih Memulai Usaha Sendiri

**KOMISI** Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional bekerjasama dengan ILO dan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*), akan menggelar program Pelatihan untuk Pelatih tentang Memulai Usaha Sendiri (*Start Your Business/SYB*) yang dirancang bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS selama dua minggu, dari 19 hingga 30 Juni 2006, di Kuta, Bali.

Tujuan dari pelatihan ini adalah mencegah pengucilan sosial bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) dengan meningkatkan kecakapan kerja dan kemampuan kerja mandiri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta dukungan keuangan mikro dan pemasaran. Pelatihan ini pun bertujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajemen para ODHA sehingga mereka dapat mengidentifikasi peluang usaha dan memulai usaha mereka sendiri.

"Epidemi global HIV/AIDS sangat berdampak pada usia kerja dan mereka yang tergantung pada kelompok usia ini. Pelatihan Memulai Usaha Sendiri ini dapat membantu orang yang hidup dengan HIV dan AIDS mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam memulai dan mengelola usaha kecil. Ini pun akan membantu mereka menciptakan peluang kerja dan memperoleh pendapatan untuk biaya pengobatan dan lainnya," ujar Alan Boulton, Direktur ILO untuk Indonesia.

Memulai Usaha Sendiri merupakan program pelatihan ILO yang ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan kewirausahaan bagi mereka yang sudah menjalankan dunia usaha atau berniat menjadi wirausahawan. Program ini telah diperkenalkan di lebih dari 80 negara di dunia. Di Indonesia, program ini diperkenalkan ILO pada awal 2003, bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Pelatihan memberikan panduan secara tahap demi tahap mengenai cara mengelola usaha yang efektif. Pelatihan terbagi ke dalam delapan tahapan yang meliputi, di antaranya, keterampilan mengenai bagaimana menyusun ide usaha, mengkaji pasar, pelanggan dan pesaing, menyusun rencana pemasaran, mengelola karyawan, memilih bentuk usaha, memperkirakan modal awal, menghitung penjualan dan membuat rencana penjualan dan biaya yang diperlukan.

Pelatihan seperti ini merupakan pelatihan pertama yang pernah dilakukan, dan pelatihan sejenis akan dilaksanakan pada tahun ini. Pelatihan ini akan dihadiri sekitar 20 peserta yang berasal dari LSM dan kelompok pendukung ODHA di Makassar, Manado, Batam, Pontianak, Maluku, Palembang, Papua, Papua Barat, Yogyakarta, dan Jakarta.

Salah seorang peserta, Indri Morizette dari Yayasan Gaya Celebes, menyatakan keinginannya untuk segera menyelenggarakan pelatihan-pelatihan serupa di Makassar, Sulawesi Selatan. "Saya belajar banyak bagaimana menjadi

© ILO



“ Saya belajar banyak bagaimana menjadi seorang pelatih dan fasilitator yang baik. Saya berlatih memfasilitasi tahapan-tahapan memulai usaha sendiri. ”

seorang pelatih dan fasilitator yang baik. Saya berlatih memfasilitasi tahapan-tahapan memulai usaha sendiri. Juga menyenangkan saat kinerja saya dievaluasi oleh para peserta lain dan pelatih. Saya banyak mendapatkan masukan untuk hasil akhir yang lebih memuaskan.”

Organisasi-organisasi ini dipilih dari provinsi-provinsi yang berpartisipasi dalam program percepatan 100 kabupaten/kota di bawah KPA. Sebagai hasil pelatihan, masing-masing pelatih diharapkan melaksanakan sedikitnya dua pelatihan Memulai Usaha Sendiri, yang menjangkau dan memungkinkan sekitar 400 ODHA dan keluarga mereka memulai dan menjalankan usaha mereka sendiri.

Di Indonesia, terdapat sekitar 90.000 sampai 130.000 orang yang hidup dengan HIV/AIDS 2005, di mana 75% adalah laki-laki dan 25% perempuan. Diperkirakan, sekitar 20 juta orang Indonesia berisiko tinggi terhadap infeksi HIV. Akibat sejumlah faktor pendorong seperti besarnya angkatan kerja berpindah, meningkatnya industri seks dan sangat rendahnya tingkat pemakaian kondom, diperkirakan angka mereka yang terinfeksi akan menjadi dua kali lipat pada 2006.

## Peningkatan Pemahaman tentang Migrasi Kerja



© ILO

khususnya di sektor ekonomi di mana terdapat peningkatan jumlah pekerja migran dan/atau kesewenangan dan pelanggaran atas hak kerja dan manusia," kata dia.

Kegiatan yang sedang berjalan terkait dengan migrasi kerja dan pekerja migran tertuang dalam penyusunan serangkaian brosur di bulan April, untuk membantu serikat pekerja meningkatkan jangkauan mereka meraih para calon pekerja migran. Brosur pertama meliputi hal-hal penting berkenaan dengan perundangan mengenai pekerja migran (Undang-Undang No. 39 Tahun 2004). Brosur kedua mencakup permasalahan terkait kesadaran akan perlindungan dasar, sementara yang ketiga meliputi informasi dasar dari negara-negara tujuan yang didatangi para pekerja Indonesia. Ketiga paket informasi ini mengidentifikasi organisasi serikat pekerja dan LSM di mana (calon) pekerja migran dapat memperoleh informasi lanjutan.

Asenaca Colawai, Staf ILO mengenai Aktivitas Pekerja, brosur-brosur ini disebarluaskan melalui jejaring serikat pekerja dan LSM. "Rencana sedang dibahas menyangkut upaya memperkokoh jejaring serikat pekerja di seluruh negeri,

## Upah Minimum dan Peluang Pendidikan

Untuk melibatkan serikat pekerja dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak di Indonesia, Program Penghapusan Pekerja Anak ILO membantu pelaksanaan survei mengenai hubungan antara upah pekerja, pendidikan anak dan pekerja anak di empat kota: Jakarta, Depok/Bogor, Surabaya, dan Samarinda. Studi-studi ini dilakukan sendiri oleh serikat pekerja antara bulan Februari dan Maret, yang diikuti dengan seminar pada April dan Mei. Diskusi-diskusi lanjutan terfokus pada temuan-temuan studi yang digunakan sebagai landasan kampanye serikat pekerja untuk meningkatkan pelaksanaan skema biaya operasional sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah dan bekerja.



## Ketenagakerjaan Muda: Hak Pekerja Muda

Beragam materi informasi, pendidikan dan komunikasi disusun sebagai bagian dari upaya serikat pekerja meningkatkan pemahaman para pekerja muda mengenai hak-hak mereka dan pentingnya peranan serikat pekerja menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Materi dari paket informasi tersebut diringkas dari serangkaian lingkaran studi dan diskusi yang diselenggarakan dari April – Desember 2005. Ini kemudian dikembangkan ke dalam materi informasi dalam pelatihan tiga hari di bulan Juni mengenai penggunaan *Adobe Photoshop* untuk menerjemahkan pesan ke dalam bentuk paket informasi. Paket ini kini digunakan oleh serikat pekerja untuk menarik anggota-anggota baru, yang disasarkan pada pekerja dan kaum muda umumnya.

## Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Serikat pekerja di Batam, Papua dan Surabaya secara aktif terlibat dalam peningkatan Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Manual pelatihan ini disusun di bawah panduan Proyek HIV/AIDS sebagai bahan referensi bagi serikat pekerja dalam sesi-sesi pendidikan di tempat kerja di masa mendatang.

## Kegiatan Pekerja Aceh

Proyek Pelatihan Kerja ICFTU-APRO/ GUFs dan Rehabilitasi Serikat Pekerja TUC telah mendorong partisipasi penuh para serikat pekerja Aceh dan Sumatra Utara (Pulau Nias). Proyek ICFTU-APRO mengenai Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan Kerja hingga saat ini telah secara keseluruhan melatih 560 orang, dengan 32% di antaranya adalah perempuan. Kendati tidak terbilang besar, tapi menggembirakan karena setidaknya satu persen menemukan pekerjaan, dan sekitar 1,7% memulai usaha kecil secara perorangan maupun bersama keluarga. Ini merupakan kemajuan yang patut dicatat mengingat lambannya iklim investasi di Aceh dan kurangnya peluang pekerjaan di mana para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman kerja.

Proyek TUC mengenai Rehabilitasi Serikat Pekerja melalui Pendidikan dan Pelatihan hingga kini telah melatih 448 orang, dengan 31% di antaranya kaum perempuan. Sekitar 5,6% menjangkau anggota serikat kerja baru yang tinggal di luar Banda Aceh. Selanjutnya serangkaian pelatihan dasar mengenai peran dan fungsi serikat pekerja, hak pekerja, peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional dilakukan, demikian juga pelatihan penyegaran bagi pemimpin serikat serta pengajar/pelatih lokakarya mengenai majemen serikat pekerja.



© ILO

Selanjutnya, manual pelatihan mengenai hal tersebut di atas disusun dan akan segera diterbitkan sebagai bahan referensi serikat. "Proyek pun akan mendukung partisipasi serikat pekerja dalam seminar dan diskusi tripartit mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta penerapan perundangan ketenagakerjaan di Aceh dan Sumatra Utara (Pulau Nias) untuk mendorong dan memperkuat kapasitas serikat dalam dialog sosial," Asenaca menjelaskan.

## BUKU

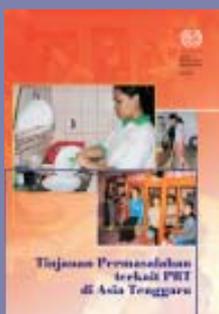


### Memanfaatkan Hukum Indonesia untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina

Publikasi ini menyoroti praktik-praktik dan pengalaman-pengalaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Filipina, salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Dengan lebih dari 30

tahun dalam penanganan program pekerja formal di luar negeri, Filipina merupakan sumber pengalaman yang baik dijadikan acuan sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia, yakni menguatkan dan meningkatkan kebijakan dan peraturan migrasi ketenagakerjaan, administrasi dan pelaksanaannya.

informasi mengenai posisi pekerja rumah tangga serta meningkatkan pemahaman akan praktik-praktik terbaik yang dapat dilaksanakan bagi kepentingan dan kesejahteraan para pekerja. Publikasi ini juga merupakan bagian dari upaya ILO bersama mitra kerjanya dalam menciptakan kondisi kerja yang layak bagi semua pekerja.



### Tinjauan Permasalahan Terkait Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara

Publikasi ini memberikan referensi mengenai hak dasar manusia dan hak pekerja berkenaan dengan pekerja rumah tangga, khususnya mengenai tindak kekerasan dan eksploitasi yang kerap mereka hadapi. Publikasi ini pun diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dasar dan berbagi



### Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik

Publikasi ini dipersiapkan oleh Proyek ILO mengenai Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara dengan tujuan untuk mendukung pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, akademisi dan pengambil keputusan

dalam menelaah dan melaksanakan penguatan kebijakan dan kerangka kerja hukum bagi pekerja rumah tangga. Pengujian peraturan hukum yang ada, standar internasional dan praktik terbaik merupakan langkah awal dari program ini guna memastikan kondisi dan perlakuan yang adil bagi kelompok kerja yang rentan dan besar ini.

## Membangun Lapangan Kerja Memperoleh Penghasilan

# Program ILO di Aceh :

**TUJUAN** utama dari program respons ILO atas tsunami di Aceh adalah menciptakan kondisi yang dapat dengan cepat memulihkan dan membangun kembali ekonomi setempat, yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh. Program ILO di Aceh mencakup enam komponen program besar, yakni: 1) Layanan Ketenagakerjaan; 2) Pelatihan Kerja dan Keterampilan; 3) Pengembangan Usaha (SYB) dan Keuangan Mikro; 4) Rehabilitasi Jalan Perdesaan Padat Karya; 5) Pencegahan Pekerja Anak; dan 6) Pembangunan Ekonomi Setempat.

Program ILO di Aceh berlandaskan keahlian dan pengalaman ILO dalam mendorong ketenagakerjaan saat pasca krisis. Sejak Februari 2005, program terpadu ILO di Aceh memberikan kepada sekitar **18.000 orang** semacam bantuan kerja, **9.600** mendapatkan pekerjaan, **8.000** memperoleh pelatihan keterampilan, dan **570** usaha terbentuk.

Parissara Liewkeat, Unit Manajer Program untuk Program ILO di Aceh, mengatakan bahwa pelaksanaan strategi ILO berlandaskan pada prinsip-prinsip utama di dalam Pemulihan/Pembangunan Ekonomi Lokal, yaitu: kepemilikan setempat, keterlibatan aktif para pihak terkait di semua tingkatan siklus program (dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi), dan pembangunan kapasitas bagi kelompok dan lembaga lokal.

"Strategi ini merumuskan program promosi ketenagakerjaan sejalan dengan analisis kebutuhan pasar kerja, masyarakat dan perorangan. Pelatihan keterampilan menjadi jantung dari semua kegiatan program, tapi juga terkait langsung dengan pekerjaan sebagai bagian dari upaya mendapatkan penghasilan langsung dan meningkatkan peluang kerja bagi perorangan dan masyarakat," ia melanjutkan.

Dalam pelatihan keterampilan, para peserta menerima pelatihan mengenai memulai usaha dan manajemen. Program pelatihan Memulai Usaha Sendiri (Start Your Business/SYB) hingga saat ini melahirkan lebih dari 60 pelatih: 22 orang menjadi pelatih sejak tahun lalu, sementara sisanya baru saja selesai menjalani pelatihan.

**Ke-22** pelatih ini telah melatih **708** perempuan dan **322** laki-laki,

dengan jumlah keseluruhan **1.030** orang. Sekitar **570** di antara mereka telah memulai usaha sendiri, dengan **233** di antaranya menerima bantuan modal usaha. Usaha-usaha ini menciptakan **890** pekerjaan dalam masyarakat.

Terkait dengan kebutuhan masyarakat pasca krisis/bencana akan kualitas rumah yang terbangun, perhatian khusus diberikan pada kegiatan konstruksi. **Serangkaian** pelatihan keterampilan yang diberikan bagi para pekerja dan pemilik rumah—**1.080** pekerja dan **240** pemilik rumah. Kegiatan ini memperlihatkan kemajuan yang dramatis sehubungan kualitas rumah yang sangat memuaskan para anggota masyarakat. Sektor konstruksi saat ini memberikan masyarakat Aceh tidak hanya peluang kerja namun juga kesempatan untuk mengasah keterampilan guna memperoleh pekerjaan yang baik.

Kesetaraan gender menjadi fokus utama dalam pendekatan terpadu ini dengan perhatian khusus diberikan pada upaya mempromosikan kemampuan dan kecakapan kerja perempuan pengusaha dan insinyur perempuan. Contohnya, dukungan yang ada diberikan kepada kaum perempuan yang terlibat dalam pembuatan batu bata yang mengarah pada penciptaan lebih dari **100** pekerjaan dan pendirian **19** usaha, di mana ILO memberikan dukungan atas perluasan pasar. Selain itu,



© ILO

# KEMAJUAN TERKINI

program magang ILO menempatkan **183 lulusan insinyur dalam badan-badan rekonstruksi.**

Masyarakat lokal, serta organisasi bantuan, mendapatkan manfaat dari strategi terpadu ILO ini. Rehabilitasi jalan padat karya diterapkan untuk menciptakan pekerjaan segera dalam masyarakat. Dukungan teknis ILO didasarkan pada pegawai Pekerjaan Umum Kabupaten dan para kontraktor skala kecil sehingga mereka dapat mengatur kontrak pembangunan jalan dan membangun jalan berkualitas dengan baik.

“Pendekatan ini memungkinkan masyarakat di Aceh Besar dan Nias menikmati akses yang lebih mudah ke pusat-pusat ekonomi untuk beraktivitas dengan direhabilitasinya **18 kilometer jalan perdesaan dan 28.000 hari kerja dihasilkan bagi para anggota masyarakat,**” Parissara menjelaskan.

Mengingat wirausaha kecil dan mikro membutuhkan akses terhadap modal untuk mengembangkan kegiatan mereka, program keuangan mikro dijalankan untuk meningkatkan kemampuan lembaga keuangan. **Delapan pelatihan** dijalankan bagi lebih 200 peserta yang berasal dari lebih 30 lembaga keuangan. Mekanisme dana bergaransi dibentuk dan menciptakan lebih dari 400 pekerjaan.

Kemudian, lembaga koperasi Islam, Baitul Quirah Baiturahman, dipilih dan menerima bantuan teknis dari ILO. Hanya dalam kurun waktu tujuh bulan, **koperasi ini menjadi jaringan keuangan mikro pertama di Aceh dengan empat**



©ILO

**“ Pelatihan keterampilan menjadi jantung dari semua kegiatan program, tapi juga terkait langsung dengan pekerjaan sebagai bagian dari upaya mendapatkan penghasilan langsung dan meningkatkan peluang kerja bagi perorangan dan masyarakat ”**

**cabang, 1.200 anggota dan menciptakan 378 pekerjaan.** Kegiatan ini apabila direplikasi dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan pertumbuhan finansial di sektor usaha mikro dan kecil.

Guna menyiapkan masa depan yang lebih baik, ILO bersama dengan Departemen Pendidikan, Kantor Dinas Tenaga Kerja, balai latihan kerja, Save the Children, dan pusat pembelajaran masyarakat memperkokoh keterampilan dan pelatihan pra-kerja bagi anak-anak kelompok usia 13-15 dan 15-17 tahun. **Secara keseluruhan, 3.702 anak-anak di Aceh dan Nias terlibat aktif dalam kegiatan ini, termasuk 1.645 laki-laki dan perempuan dari 19 sekolah dan satu pusat pembelajaran masyarakat.**

©ILO



# ILO DUKUNG Pemulihan Timor Leste dari Konflik

KONFLIK yang terjadi baru-baru ini, berawal di bulan Mei 2006, melahirkan kericuhan sosial dan tindak kekerasan yang mengakibatkan 146.000 orang kehilangan rumah mereka. Lebih banyak lagi yang kehilangan pekerjaan mereka. Menyikapi hal ini, melalui kemitraan dengan UNDP, ILO menjalankan proyek bekerja-dengan-imbalan-tunai yang memberikan peluang kerja sementara bagi kelompok rentan, terutama kaum muda.

Perburuhan, mendata lebih dari 4.700 pencari kerja dari seluruh 13 kecamatan. Sebagai bagian dari prakarsa pembangunan kapasitas di dalam Departemen Perburuhan, keseluruhan partisipasi perempuan meningkat dari 20,8% ke 25%.

© ILO



“ Kurang dari satu bulan, Proyek Servi Nasaun memberikan 25.933 dari 180.000 hari kerja yang ditargetkan pada akhir 2006, yang setara dengan pekerjaan jangka pendek bagi 120.000 orang ”

Pelaksanaan proyek ini, “Bekerja untuk Mengurangi Konflik dan Memenuhi Kebutuhan Pokok” (*Work for Conflict Reduction and Meeting Basic Needs*) atau Servi Nasaun (Bekerja demi Bangsa)”, didanai Pemerintah Jepang, Australia dan Swedia. Kurang dari satu bulan, Proyek Servi Nasaun memberikan 25.933 dari 180.000 hari kerja yang ditargetkan pada akhir 2006, yang setara dengan pekerjaan jangka pendek bagi 120.000 orang.

Selanjutnya, ILO terus memberikan dukungan melalui Proyek Pelatihan Keterampilan untuk Ketenagakerjaan (*Skills Training for Gainful Employment Programme/STAGE*), dan meningkatkan peluang kerja melalui pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Pada akhir Maret, Proyek menjangkau sekitar 2.000 orang hanya melalui kegiatan pelatihan dan keuangan mikro. Sistem pangkalan data pasar kerja di bawah unit Layanan Ketenagakerjaan, Departemen

Proyek Memperkokoh dan Meningkatkan Hubungan Industrial (*Strengthening and Improving Labour Relations/SIMPLAR*) yang baru saja berakhir membantu penyusunan delapan rancangan peraturan perundangan mengenai, inter alia, ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan dan migrasi. Proyek pun berperan dalam meningkatkan kapasitas para mediator, pengawas dan staf layanan ketenagakerjaan di bawah Departemen Perburuhan, serta anggota tripartit dari Dewan Ketenagakerjaan, Arbitrase dan Upah Minimum.

“Kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste, saat bertemu dengan Direktur Jenderal ILO di bulan Maret. Presiden Xanana menilai pengangguran muda dan tidak memadainya peraturan ketenagakerjaan sebagai permasalahan utama dalam dunia ketenagakerjaan dan perburuhan di Timor Leste,” demikian Christianus Panjaitan, ILO Staf.

# PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI untuk *Masa Depan yang Menjanjikan*

TIGA kegiatan pelatihan berbasis kompetensi diselenggarakan bersama dengan Balai Latihan Kerja, dengan disponsori SKILLS-AP, Bangkok. Ketiga kegiatan ini diadakan berdasarkan rencana aksi yang dirumuskan selama Pelatihan untuk Pelatih mengenai Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan ILO di Surabaya dan Puncak pada 2004.



© ILO

Lokakarya tentang Finalisasi Modul Berbasis Kompetensi di Sektor Pertanian digelar di Balai Besar Pengembangan Perluasan Kerja (BBPPK), Lembang, pada 18-20 Juni. Balai ini sebelumnya dikenal sebagai Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Lembang dengan spesialisasi pada pelatihan kerja

pertanian. Sekitar 23 peserta berpartisipasi dalam lokakarya ini, terdiri dari pada instruktur dan karyawan BBPPK. Sebuah modul bertajuk "Modul Pakan Ayam" terlahir dari lokakarya ini.

Bekerjasama dengan BLKI Jombang dan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC), dua bentuk pelatihan berbasis kompetensi di bidang bordir dan industri makanan diselenggarakan bagi anak-anak yang ditarik dari prostitusi selama dua bulan dari 28 Juni hingga 28 Agustus. Enam belas anak berusia 16-18 tahun dari para mitra ILO, Yayasan Abdi Asih dan Yayasan Genta, berpartisipasi dalam pelatihan ini.

"Pelatihan-pelatihan ini diadakan dengan keyakinan bahwa keterampilan kerja dan perubahan mental merupakan hal-hal mendasar dalam membantu anak-anak ini mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan," ujar staf ILO, Djoa Sioe Lan, seraya menambahkan bahwa apabila anak-anak ini tidak berkesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, mereka dikhawatirkan kembali ke profesi lama mereka.

Pelatihan ketiga adalah pelatihan berbasis kompetensi tentang perabotan melamin yang digelar bersama dengan BLKI Singosari selama enam hari pada 24-29 Juli. Sekitar 16 pencari kerja dilatih, yang merupakan jumlah peserta maksimal yang dapat diakomodir BLK per pelatihan, dan memperoleh pekerjaan di PT Melamine Furniture Industries di Pasuruan, sebuah perusahaan perabotan yang mengeksport produk-produknya ke Eropa dan Amerika Serikat.

## Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Pelatihan Memulai Usaha

PROYEK ILO tentang Kewirausahaan Muda dan Memulai Usaha di Aceh menggelar Pelatihan untuk Pelatih mengenai Memulai Usaha Anda dari 24 Juli hingga 4 Agustus. Sekitar 15 peserta, sembilan laki-laki dan enam perempuan, dari lembaga internasional dan nasional, layanan pengembangan usaha dan organisasi pengusaha berhasil melewati proses seleksi dan berpartisipasi dalam pelatihan. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Aceh (Lhokseumawe, Sigli, Meulaboh, Banda Aceh, Langsa dan Bireuen) serta Nias.

Pelatihan diberikan Pelatih Utama Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda, Sergei Música, yang juga menjabat sebagai Kepala Penasihat Teknis Proyek. "Setelah pelatihan, para peserta diharapkan menjalankan pelatihan serupa bagi para wirausahawan yang ada maupun berpotensi agar dapat memulai atau meningkatkan usaha mereka sendiri," Sergei menjelaskan.

Pelatihan manajemen usaha dari Memulai Usaha Anda ini merupakan bagian dari pendekatan terpadu di Aceh guna menciptakan lapangan kerja setelah tsunami. Pendekatan ini memahami kebutuhan akan pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan, diikuti dengan pelatihan manajemen usaha, yang dilengkapi dengan akses atas keuangan mikro, serta dengan dukungan memadai dari layanan pengembangan usaha di setiap tingkatan.

# Cuplikan Serangkaian Bincang-bincang Radio **SMART WORKERS**

ILO dan SmartFM menggelar serangkaian bincang-bincang radio interaktif sepanjang 60 menit di Balikpapan, Surabaya, Makassar dan Semarang dari Mei – Juli 2006. Bincang-bincang radio di Balikpapan, "Mekanisme Sub-kontrak: Pro dan Kontra", digelar pada 23 Mei, menghadirkan Slamet Brotosiswoyo (Direktur Perusahaan Konstruksi), Irvan Wirayudha (Ketua Serikat Mathilda), Suryanto (Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan), dan Carmelo Noriel (ILO).

Acara di Surabaya membahas mengenai masalah pekerja rumah tangga, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga" pada 24 Mei, menampilkan Hesti Armiwulan (Direktur Pusat Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya), Saleh Mukadar (Ketua Komisi E, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur), Drs. Suyono (Ketua Dewan Pengembangan Masyarakat), dan Tauvik Muhamad (ILO).

Bincang-bincang radio di Makassar dan Semarang mengangkat masalah pekerja anak pada 1 Juni dan 26 Juli. Di Makassar, dibahas mengenai masalah pekerja anak di bagian timur Indonesia, "Menanggulangi Pekerja Anak di Bagian Timur Indonesia: Apakah Menjadi Prioritas?" dengan para panelis: Baso Bachtiar (Ketua Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Andi Mallanti (Koordinator Regional KSBSI), dan Abdul Hakim (ILO).

Sementara itu, berkenaan dengan peringatan Hari Anak Nasional, acara serupa membahas "Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual", menampilkan Sri Mulyanah (Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah), Hening Budiawati (Direktur Eksekutif Yayasan Setara), Benny D. Setianto (Peneliti dan Dosen Senior, Universitas Katolik Soegijapranata) dan dan Arum Ratnawati (ILO).



**SMART** Workers adalah bincang-bincang radio interaktif, kerja sama ILO dengan radio SmartFM yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mendasar di tempat kerja. Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang isu ketenagakerjaan, simak terus 95,9

**SMART WORKERS**

**LIVE** In 10 Stations

Every Thursday  
16 - 17 WIB

MANADO · MAKASSAR · PALEMBANG · BALIKPAPAN · BANJARMASIN · SEMARANG · JAKARTA · SURABAYA · PEKANBARU · MEDAN